

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya terhadap daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.¹ Setiap kota merupakan pusat dari segala kegiatan pemerintahan, perekonomian, dan pembangunan. Kondisi tersebut membuat kota mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan setiap tahunnya dikarenakan ruang-ruang kota diisi dengan semua aktivitas masyarakat yang sangat kompleks. Pertumbuhan kota yang pesat kemudian akan berimplikasi pada pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka (6) tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pada Pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri dari 3 bentuk, yakni :

¹ Harsens Nursa Prabawa, "Implementasi Kebijakan Kampung Bantar Di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi," *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)* Vol. 2 No. 1 (Februari 2020), <https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i1.951>". Hlm.34

² Achmad Nurmandi, *Manajemen Perkotaan Teori: Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan Dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas* (Yogyakarta: Jusuf Kalla School of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (JKSG UMY), 2014. Hlm.26.

1. urusan pemerintahan absolut, merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
 2. urusan pemerintahan konkuren, merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
 3. urusan pemerintahan umum, merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.³
- Berdasarkan dari 3 bentuk tersebut, dasar pelaksanaan dari otonomi daerah

dibagi pada urusan pemerintahan konkuren, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pada Pasal 12 ayat (1) menjelaskan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi, Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum dan penataan ruang, Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, Ketertiban umum, dan Perlindungan masyarakat dan Sosial. Sedangkan urusan Pemerintahan pilihan yang dijelaskan pada ayat (3) meliputi Kelautan dan perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan sumber daya mineral, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Pasal 1 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Program Kampung Bantar merupakan salah satu program unggulan yang ditawarkan Syarif Fasha dan masih berjalan sampai sekarang, maksud dari

³ Sherlock Halmes Lekipiouw, "Konstruksi Penataan Daerah Dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan," *Jurnal (SASI)* Vol. 26 (2020). <https://fhukum.unpatti.ac.id/>

program ini dikarenakan masih adanya beberapa permasalahan dilingkungan tempat tinggal masyarakat, antara lain permasalahan kebersihan dari masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan, Permasalahan kebersihan ini tidak terlepas dari Jumlah penduduk Kota Jambi yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2019 sebanyak 604.738 jiwa (BPS Kota Jambi, 2020) dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan sebanyak 423.45 ton/hari (SIPSN, 2022) dan di tahun 2022 jumlah penduduk Kota Jambi meningkat menjadi 619.553 jiwa (BPS Kota Jambi, 2023) dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan sebanyak 437.50 ton/hari (SIPSN, 2023). Berdasarkan data SIPSN (2023).⁴ peningkatan jumlah timbulan sampah ini yang membuat pemerintah mencari solusi untuk mengurangi permasalahan ini dengan melakukan Program Kampung Bantar dan membuat Bank sampah di setiap tempat di Kota Jambi.

Program Kampung Bantar juga ingin mengatasi permasalahan keamanan dilingkungan masyarakat, dengan menjalankan kembali poskamling untuk masyarakat agar untuk mencegah kriminalitas pencurian dilingkungan tempat tinggal masyarakat. Program ini mulai dilakukan melalui Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2019 perubahan pertama dari Peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Kampung Bantar (Bersih, Aman, dan Pintar), dan mulai berjalan ditahun 2014 hingga sekarang,

⁴ Umniah Hanesti, Dwi Nowo Martono, and Sri Setiawati Tumuyu, "Analisis Pengolahan Sampah Restoran Di Kota Jambi," *Dinamika Lingkungan Indonesia* Vol. 11 (2024). <https://dli.ejournal.unri.ac.id/index.php/DL>

Jumlah Rukun Tetangga RT sejak dimulainya program ini ditahun 2014 telah diikuti sebanyak 1.308 RT, atau sebesar 79,2 %, dari 1.651 RT se-Kota Jambi.⁵

Pemerintah Kota Jambi melalui program ini ditujukan untuk mengakselerasi percepatan pembangunan di Kota Jambi yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah, meningkatkan kualitas kesejahteraan dan meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat yang bertugas melakukan kegiatan pembinaan dari tingkat terkecil di hirarki pemerintahan seperti dengan Lurah dan RT.⁶ serta meningkatkan motivasi pada wawasan, jiwa bergotong royong dan kepedulian terhadap Kebersihan, Keamanan, dan Kepintaran di masyarakat Kota Jambi, Untuk menciptakan suasana kompetitif yang sehat antar kampung di wilayah Kelurahan dalam Kota Jambi.

Pemerintah Kota Jambi berdasarkan Pasal 10 Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2019 Juga melakukan pengawasan lokasi Kampung Bantar yang akan menjadi unggulan, melakukan monitoring dan evaluasi selama kegiatan berlangsung, melakukan pencatatan dan pelaporan Kampung Bantar yang diselenggarakan. Program yang menjadi gagasan dari pemerintah Kota Jambi ini selalu di nilai dan di perlombakan setiap tahunnya untuk memotivasi masyarakat dalam menjadikan kawasannya sebagai salah satu kampung yang bersih, aman dan pintar. Berdasarkan dari Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2019 Ketiga indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut :

⁵ Mediator News.com, “Penguatan Lembaga Kemasyarakatan, Pemkot Berikan Apresiasi RT Pemenang Kampung Bantar Periode II Tahun 2023,” *Mediator News.Com*, November 2023, <https://mediatornews.com/2023/11/03/penguatan-lembaga-kemasyarakatan-pemkot-berikan-apresiasi-rt-pemenang-kampung-bantar-periode-ii-tahun-2023/>. Diakses pada tanggal 14 mei 2024

⁶ Pemerintah Kota Jambi, Kecamatan Pasar Jambi “Kampung Bantar,” 2021, <https://kecpasarjambi.jambikota.go.id/kampung-bantar/>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2024

1. Bersih, Pada indikator ini diharapkan terjadinya peningkatan kebersihan dilingkungan masyarakat, serta pemeliharaan fasilitas umum yang telah dibuat, perawatan tanaman toga dan menjaga kebersihan drainase dilingkungan sekitar.
2. Aman, Pada indikator ini diharapkan terjadinya lingkungan yang bebas dari bahaya NAPZA dan MIRAS, kriminalitas, dan pemeliharaan poskamling beserta kelengkapannya dan keaktifannya.
3. Pintar, Pada indikator ini diharapkan terjadinya peningkatan minat baca dan pemeliharaan taman baca yang ada dimasyarakat, serta keaktifan kegiatan yang dilakukan dilingkungan masyarakat.

Berdasarkan dari 3 indikator tersebut Pada Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi

Nomor 11 Tahun 2019 menetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi selaku pelaksana teknis penilaian Kampung Bantar yang akan menilai sesuai format penilaian Kampung Bantar yang terdapat pada lampiran Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2019. Dari penjelasan yang telah di terangkan, menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Jambi mempunyai visi dan misi, visi Kota Jambi yaitu “menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat berakhlak dan berbudaya dengan mengedapankan pelayanan prima”. Adapun misi Kota Jambi yaitu:

1. Penguatan birokrasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi;
2. Penguatan penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kenyamanan masyarakat;
3. Penguatan pengelolaan infrastruktur dan masyarakat;
4. Penguatan pengelolaan infrastruktur dan utilitas perkotaan serta penataan lingkungan;
5. Penguatan kapasitas ekonomi perkotaan”.⁷

Berdasarkan pada latar belakang diatas, menurut penulis telah Terjadi *das sollen* dan *das sein*, *das sollen* yang dimaksud yakni keinginan pemerintah Kota Jambi untuk membuat setiap tempat tinggal dimasyarakat Kota Jambi menjadi

⁷ Darmuji dan Khuswatun Hasanah, “Dampak Program Kampung Bantar Terhadap Perilaku Masyarakat Kota Jambi,” *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn* Volume 10 No. 1 (2023), <https://doi.org/10.36706/jbtiv10il.19385>. Hlm. 45

tempat yang bersih, aman dan pintar dan meningkatkan semangat gotong royong masyarakat dan meningkatkan pembangunan di setiap RT yang mengikuti Program Kampung Bantar yang dilakukan Pemerintah agar terus dilakukan masyarakat secara berkelanjutan, Dan bagaimana *das sein* yang terjadi di masyarakat sekitar di Kecamatan Jelutung, apakah masyarakat hanya menerapkan makna Program Kampung Bantar selama kegiatan berlangsung saja, dan tidak adanya keberlanjutan yang dilakukan masyarakat dalam semangat bergotong royong di tempat tinggalnya, yang artinya apa yang ingin diwujudkan Pemerintah Kota Jambi, belum sepenuhnya terimplementasikan di lapangan, atau malah sesuai yang di cita-citakan oleh Pemerintah Kota Jambi, maka dari itu penulis mengangkat judul terkait **“Pelaksanaan Program Kampung Bantar Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Semangat Gotong Royong Di Kecamatan Jelutung Kota Jambi”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pemerintah Kota Jambi di Kecamatan Jelutung dalam menjalankan pelaksanaan Program Kampung Bantar?
2. Apasaja Kendala yang ditemui dalam Implementasi Program Kampung Bantar di Kecamatan Jelutung Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tindakan Pemerintah Kota Jambi dalam upaya menerapkan Program Kampung Bantar di setiap Kecamatan yang ada di Kota Jambi terkhusus di Kecamatan Jelutung.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan program Kampung Bantar dalam rangka meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam semangat gotong royong di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat di dalam penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai salah satu sebuah referensi dan memberikan wawasan terkait bagaimana tindakan Pemerintah Kota Jambi dalam upaya menerapkan pelaksanaan Kampung Bantar (Bersih, Aman dan Pintar) dalam meningkatkan kualitas hidup di setiap Kecamatan di sekitar Kota Jambi dalam upaya memperbaiki berbagai aspek, terkhusus pada aspek gotong royong yang perlu ditingkatkan untuk memberikan pemerataan di setiap kelurahan yang ada di Kota Jambi dan upaya untuk ingin mengetahui peran masyarakat sekitar dalam berpartisipasi, bergotong royong dan ikut menyukseskan program yang dilakukan pemerintah yakni pada program Kampung Bantar di tempat tinggalnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian

yang sama yakni Program Kampung Bantar (Bersih, Aman dan Pintar), serta dapat menjadi bahan masukan dalam bidang Hukum Administrasi Negara, dan dapat dijadikan rekomendasi untuk pihak-pihak yang membutuhkan, yaitu :

a. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dapat memberikan sebuah analisis serta edukasi bagi masyarakat terkhususnya di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi mengenai Program Kampung Bantar (Bersih, Aman dan Pintar), penerapan dari semua makna dalam aspek Bersih, Aman dan Pintar diharapkan mampu direalisasikan, dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang baik membuat fondasi dalam pengembangan dan keberlanjutan dari Program Kampung Bantar bisa terus dilakukan sehingga bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, selain itu penulis mengharapkan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi masyarakat terkait Program Kampung Bantar (Bersih, Aman dan Pintar) agar lebih peduli terhadap lingkungan di sekitar tempat tinggalnya dan untuk meningkatkan standar kualitas hidup di Kampungnya.

b. Pemerintahan Kota Jambi

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan serta kritik terkait dari penerapan Program Kampung Bantar (Bersih, Aman, dan Pintar) di Kota Jambi, agar program ini dapat terselenggara dengan baik dan merata di setiap tempatnya agar memberikan daya saing

bagi setiap Kecamatan untuk membuat tempat tinggalnya lebih baik dari Kecamatan yang lain, supaya mendapatkan penghargaan yang di berikan pemerintah kepada Kecamatan yang terbaik untuk memberikan daya saing dan motivasi masyarakat untuk bergotong royong dalam memperbaiki daerah di sekitar tempat tinggalnya sesuai dengan ketentuan pada Program Kampung Bantar.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, diperlukan pembatas-pembatasan mengenai beberapa pengertian yang berkaitan dan saling mendukung. Berikut kerangka konseptual yang dijadikan bahan dalam penelitian ini.

1. Kebijakan Pemerintah

Menurut Lasswell dan Kaplan, kebijakan adalah alat untuk menggapai tujuan dimana kebijakan adalah program yang di proyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek.⁸ Kebijakan merupakan jenis tindakan Administrasi Negara berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan perundang-undangan.⁹

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa :

Peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha Negara yang bertujuan yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis dan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan.¹⁰

⁸ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik* (Jakarta: Yayasan Pancur Siwa, 2004). Hlm.21

⁹ Safri Nugraha, *Hukum Administrasi Negara* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005). Hlm. 93

¹⁰ M. Hadjon Philip, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Bandung: Citra aditya Bakti, 1994). Hlm. 152

Kebijakan pemerintah sangat terkait dengan masalah publik atau pemerintah yang ada dalam suatu negara. Anderson menyatakan bahwa Kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.¹¹

Beberapa ciri penting dari pengertian kebijakan menurut Dwidjowijoto, Pertama, kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kedua, kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup. Ketiga, kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh organisasi pelaksana. Keempat, kebijakan perlu di evaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.¹²

2. Kampung Bantar

Kampung Bantar yang berarti bersih, aman dan pintar bertujuan untuk mengajak masyarakat peduli terhadap lingkungan di sekitarnya termasuk sebagai upaya untuk mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan pada anak, hingga aksi tawuran dan penggunaan narkoba.¹³ 3 indikator kampung bantar yakni :

¹¹ M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003). Hlm. 17

¹² Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006). Hlm. 265-266

¹³ Nazela Azzahra, "Wali Kota Jambi Imbau Seluruh RT Ikuti Program Kampung Bantar," Antara Jambi, September 2022, <https://jambi.antaranews.com/berita/522145/wali-kota-jambi-imbau-seluruh-rt-ikuti-program-kampung-bantar>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2024

- a. Pertama, Indikator bersih, lingkungan yang bersih dengan mengandalkan asas gotong royong, lingkungan yang asri ditumbuhi tanaman-tanaman obat keluarga. Dalam pengelolaan sampah, setiap RT memiliki bank sampah masing-masing yang disebut bank sampah mini dengan 1 bank sampah induk.
- b. Kedua, Indikator Aman. indikator ini dijadikan untuk menciptakan lingkungan yang aman terhadap segala macam gangguan, seperti kriminalitas, narkoba bebas dari prostitusi, bencana alam dan lainnya. Untuk mewujudkan lingkungan yang aman, pemerintah mengaktifkan kembali pos kamling (pos keamanan keliling).
- c. Ketiga, Indikator pintar, Indikator pintar yakni tidak ada lagi masyarakat yang buta huruf yang kedua tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah. Untuk menciptakan masyarakat pintar maka di setiap RT terdapat sudut baca perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat bahan bacaan yang didapatkan juga merupakan hasil dari partisipasi masyarakat dengan cara mengumpulkan bahan bacaan melalui sumbangan sukarela.¹⁴

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi menurut penjelasan hukum yakni *Meaningful participation* yang menjelaskan tentang hak masyarakat untuk didengarkan, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan atas pendapatnya, dan

¹⁴ Hafizoh Yuelsa Bela, "Meneropong Smart City Kota Jambi Dari Perspektif Keberlanjutan Dan Pola Pengembangan Kampung Bantar," *Jurnal Trias Politika*, Vol 3. No.1, 2019, <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/view/2409>. Hlm. 41

diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.¹⁵

Menurut Astuti, mengemukakan tingkat partisipasi masyarakat sebagai berikut :

- a. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
- b. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
- c. Partisipasi buah pikiran merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Partisipasi social diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.
- d. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan

¹⁵ Bappeda Kabupaten Buleleng, "Teori Partisipasi : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Menurut Para Ahli," 2017, <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-partisipasi-konsep-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-menurut-para-ahli-10>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2024

kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat dapat diartikan sebagai sinergi setiap masyarakat untuk saling bergotong royong dan bahu membahu dalam mewujudkan sebuah hasil yang baik bagi lingkungan sekitar tempat tinggalnya untuk dapat mencapai keberhasilan dan kenyamanan bagi semua pihak.

F. Landasan Teoritis

Sedangkan teori hukum yang digunakan sebagai landasan dan pisau analisis dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Kebijakan Publik

Thomas R. Dye mengartikan kebijakan publik sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*”. Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Thomas R. Dye juga mengemukakan dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen, yaitu :

- a. Kebijakan publik
- b. Pelaku kebijakan, dan
- c. Lingkungan kebijakan.¹⁷

Menurut Thomas R. Dye proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut.

¹⁶ Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). Hlm. 50

¹⁷ Indah Prabawati, Tjitjik Rahaju, dan Badrudin Kurniawan, *Analisis Kebijakan Publik* (Surabaya: UNESA UNIVERSITY PRESS, 2020). Hlm. 1-2

1. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of polici problem*), Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.
2. Penyusunan agenda (*agenda setting*), Penyusunan agenda (*agenda setting*) merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.
3. Perumusan kebijakan (*policy formulation*), Perumusan (*formulation*) merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan lembaga legislatif.
4. Pengesahan kebijakan (*legitimating of policies*), Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.
5. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.

6. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik).¹⁸

Dengan Penjelasan yang telah dipaparkan, Penulis akan melakukan penelitian terkait bagaimana kebijakan Program Kampung Bantar dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam semangat gotong royong di Kecamatan Jelutung Kota Jambi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu, dan sekaligus sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan dengan menggunakan sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai bentuk landasan dalam bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Teori Pemerintahan

Pemerintahan menurut Syafiie, yakni : menyimpulkan bahwa pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, memimpin, dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.¹⁹

Pemerintahan Kota Jambi dalam mengatasi permasalahan di lingkungannya mengadakan Program Kampung Bantar (Bersih, Aman, dan Pintar) adalah sebuah inovasi yang diberikan Pemerintah Kota Jambi dalam mewujudkan visi dan misi untuk mempercepat pembangunan agar tidak terjadi

¹⁸ Ibid. Hlm. 6-7

¹⁹ Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2011). Hlm.10

ketimpangan, kemudian meningkatkan kualitas kesejahteraan di lingkungan sekitar masyarakat Kota Jambi yang dimulai dari lingkup terkecil yakni RT.

Adapun tujuan Program Kampung Bantar untuk menciptakan lingkungan dalam lingkup RT yang bersih dan sehat artinya masyarakat harus memiliki tingkat kesadaran dalam pemanfaatan lahan tidur dengan membuat sebuah ruang terbuka yang bebas dari polusi. Masyarakat harus memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan demi membentuk sanitasi lingkungan yang sehat dan baik serta memiliki jiwa sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²⁰ Sehingga masyarakat dapat nyaman dan menikmati Program yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Jambi untuk masyarakat diseluruh RT dengan baik.

3. Teori Partisipasi Masyarakat

Pengertian partisipasi selalu dikaitkan dengan peran serta. Seorang ilmuwan yang bernama Davis mengemukakan definisinya tentang partisipasi yang dikutip oleh Santoso sebagai berikut:

Partisipasi dapat didefinisikan sebagai suatu keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam suatu situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.²¹

Adapun manfaat dari partisipasi masyarakat dalam suatu Program Pemerintahan yang di lakukan Pemerintah Kota Jambi yakni masyarakat

²⁰ Harsens Nursa Prabawa, "Implementasi Kebijakan Kampung Bantar Di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi," *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, Vol. 2 No. 1, (Februari 2020), <https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i1.951>." Hlm. 35

²¹ Herman, "Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene," *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* Volume 1 No. 1, (2019), <https://stiemmamuju.e-journal.id>. Hlm. 78

mampu lebih memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab atas program yang dilakukan di lingkungan tempat tinggalnya, Meningkatkan proses belajar pada setiap masyarakat dalam hal bergotong royong untuk membuat tempat tinggalnya lebih baik lagi, Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah yang terkait langsung dengan kebijakan bagi lingkungannya, dan menciptakan ikatan erat satu sama lain antara warga dalam tolong menolong di tempat tinggalnya untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi.

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk menjamin keaslian penelitian ini dan sekaligus mempermudah memahami perbedaan isu hukum yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu

1. Skripsi Ayu Dwitasari yang berjudul **Pelaksanaan Program Kampung Bantar Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Jambi Di Kecamatan Paal Merah**, Universitas Jambi, 2021. Permasalahan yang dibahas didalam skripsi ini yakni Bagaimana pelaksanaan program Kampung Bantar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Paal Merah, metode penelitian yang digunakan yakni empiris, dan landasan teori yang digunakan yakni implementasi kebijakan publik dan kesejahteraan sosial, Kesimpulan dari skripsi ini yakni Pelaksanaan program Kampung Bantar di Kecamatan Paal Merah telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat salah satunya yaitu kesejahteraan yang mana

indikator bersih, aman, dan pintar sebagai wujud kesejahteraan yaitu mampu memberikan tingkat kehidupan yang membaik, pemenuhan kebutuhan pokok yang didapatkan, kualitas hidup yang juga membaik, dan pembangunan manusia yang diperoleh walaupun belum signifikan.²²

2. Skripsi Khairudin yang berjudul **Implementasi Smart City Melalui Program Kampung Bersih, Aman Dan Pintar Di Kota Jambi**, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi , 2023. Permasalahan yang dibahas didalam skripsi ini yakni Implementasi Smart City Melalui Program Kampung Bersih, Aman dan Pintar (Bantar) di Kota Jambi apakah berjalan baik atau tidak, metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dan landasan teori yang digunakan yakni kebijakan publik, dan implementasi, kesimpulan dari skripsi ini yakni Upaya dalam mengatasi kendala dalam pengimplementasi program Kampung Bantar dengan melakukan peratama, meningkatkan Partisipasi Masyarakat. Kedua, mengatasi keberlanjutan program kampung Bantar (bersih, aman, dan pintar).²³

Adapun skripsi yang penulis kaji dengan judul **“Pelaksanaan Program Kampung Bantar Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Semangat Gotong Royong Di Kecamatan Jelutung Kota Jambi”**. Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu : penelitian ini

²² Ayu Dwitarsari, “Pelaksanaan Program Kampung Bantar Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Jambi Di Kecamatan Paal Merah” (Universitas Jambi, 2021), <https://repository.unja.ac.id/24318/>.

²³ Khairudin, “Implementasi Smart City Melalui Program Kampung Bersih, Aman Dan Pintar Di Kota Jambi” (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2023), <https://repository.uinjambi.ac.id>.

menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris yang mana penelitiannya berada di Provinsi Jambi Khususnya di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi yang menerapkan Kampung Bantar dan juga penelitian ini berfokus pada bagaimana daya partisipasi dari masyarakat dalam menjalankan kebijakan Kampung Bantar ini dalam upaya meningkatkan semangat gotong royong, sumber daya manusia dan membuat Program Kampung Bantar ini berjalan dengan baik,. terkait dengan fokus penelitian yang di teliti dalam penelitian ini secara khusus dan komprehensif memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan keilmuan dalam rangka membuka ruang untuk diberikan kritik yang bersifat membangun.

H. Metode penelitian

Metode penelitian adalah upaya untuk mengurai permasalahan yang terjadi pada suatu penelitian, menurut pendapat dari sugiyono :

Penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi.²⁴

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Tipe/Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian hukum ini yakni penelitian Yuridis Empiris, “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang

²⁴ H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021). Hlm. 3

terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁵

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal memperoleh data dan sumber informasi dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian ini, yaitu di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, Kantor Kecamatan Jelutung, Kantor Kelurahan Kebun Handil dan RT yang menerapkan Program Kampung Bantar.

3. Sumber Data

Untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini, Penulis memerlukan berbagai sumber-sumber dari penelitian yang disebut sebagai bahan hukum, baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui informasi yang dipaparkan oleh para responden atau yang dianggap memahami masalah yang akan diteliti oleh penulis untuk mendukung hasil penelitian dari penulis.

²⁵ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* Volume 7 Edisi 1 (Juni 2020), <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>. Hlm. 28

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bahkan merupakan dokumen-dokumen resmi. “publikasi tentang buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, serta website dan situs internet berbasis ilmu hukum yang berhubungan dengan judul penelitian.

4. Populasi dan Sempel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah seluruh elemen yang akan diteliti dimana elemen tersebut merupakan sesuatu yang menjadi objek penelitian atau pengumpulan data. Populasi juga dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁶ Berdasarkan pemahaman tentang populasi tersebut, maka populasi penelitian ini adalah sebagian dari Kelurahan di Kecamatan Jelutung yang melaksanakan Program Kampung Bantar di Kota Jambi.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁷ Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu merupakan sampel yang diambil adalah memang kriteria yang telah disesuaikan penulis dengan apa yang diteliti, adapun sampel dalam penelitian ini : perkumpulan masyarakat dalam hal ini (RT) yang mengikuti Program Kampung Bantar yang dilakukan oleh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dimana masyarakat tersebut diambil dengan Random Sumpling.

c. Informan

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Kantor Kecamatan Jelutung
- c. Kantor Lurah Kebun Handil
- d. Ketua RT yang ditempatnya mengikuti Program Kampung Bantar (Bersih, Aman, dan Pintar)

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Rnd* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013). hlm.80

²⁷ *Ibid.* hlm.81

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, metode observasi adalah metode yang digunakan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian tentang peranan atau partisipasi masyarakat di Kecamatan Jelutung dalam melaksanakan Program Kampung Bantar dari Pemerintah Kota Jambi.
- e. Wawancara, yaitu dengan mengadakan pertanyaan secara langsung kepada responden dengan wawancara langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- f. Pustaka, yaitu sumber-sumber yang diperoleh dari penelitian terdahulu dan buku-buku yang terdapat pembahasan yang berkaitan dengan topik penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh penelitian baik dari studi lapangan ataupun studi dokumen terhadap data yang diperoleh di analisis secara kualitatif, dan di klasifikasi setelah itu di analisis dan ditarik kesimpulan berupa pernyataan-pernyataan yang relevan di teliti.

I. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini penulis akan mencoba menguraikan tentang latar belakang masalah penulisan yang ada di skripsi ini, di bab ini juga penulis akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas

penelitian, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum. Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum terkait tentang pemerintah daerah, Partisipasi masyarakat dan tinjauan umum terkait program Kampung Bantar (Bersih,Aman dan Pintar).

Bab III Pembahasan. Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang bagaimana Pelaksanaan Program Kampung Bantar Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Semangat Gotong Royong Di Kecamatan Jelutung Kota Jambi, bagaimana pemerintah kota jambi dalam mensosialisasikan program ini ke setiap kecamatan yang ada di Kota Jambi agar program ini terlaksana dengan baik dan merata disetiap kecamatan, dan membuat para masyarakat ikut dan berpartisipasi pada program ini.

Bab IV Penutup. Bab ini yaitu merupakan ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang telah dimuat kedalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dan bermanfaat.